

Tinjauan Sistem Dan Prosedur Penggajian Dan Perhitungan PPh 21 Pada Universitas X

Syifa Khairunnisa, Heti Herawati

Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan

E-mail: syifaaakha@gmail.com

Pay System and
Pay Document of
Tax and Salary

61

ABSTRACT

The wage system is the process of managing everything related to the payment of employees and the reporting of wage taxes. The wage system is essential in order to help the wage process better. The purpose of this research is to know the System and Procedures of Payment and the documents used, then to find out any obstacles that occur in the system of pay, as well as to know whether the calculation of PPh 21 at the University of X is accurate or not with the Regulations of the Taxation Legislation in force today. The results of this survey show that the remuneration system at X University already uses the Fingerprint Engine, the GPP Application, and the Payroll System. The system is already able to help the work of certain departments/divisions to avoid difficulties in making payrolls, calculating wages, reporting wages and preparing tax deductions. The system used is very accurate, and good. The remuneration procedures at the University X have been run by their respective divisions to avoid manipulation and fraud. As for the documents that make up the salary, they are complete and detailed. Then the remuneration procedures at the University X have been implemented in accordance with its functions, the functions consist of the function of staffing, function of payroll maker, accounting and financial functions. And there are barriers that the University of X is experiencing, however, that can be controlled. As well as PPh21 calculations, the result of the calculations is NIHIL due to net income a year below the PTKP income. The results of the evaluation in this study show that in the fingerprint system there are only those who do not do absences but the employees still want their salary to remain full. However, the SDM or Finance department at the University of X must be aware of that. Nevertheless, the employee won't get his rights because of his own mistakes. The University of X must provide even more rigorous supervision so that this will not happen again in the future.

Keywords: *pay system, ASN, pay document, PPh 21*

ABSTRAK

Sistem Penggajian adalah proses pengelolaan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran karyawan dan pelaporan pajak gaji. Sistem penggajian terus berubah sesuai dengan perubahan ekonomi, peraturan pemerintah dan kebutuhan tenaga kerja yang terus meningkat. Sistem penggajian sangat diperlukan agar dapat membantu proses penggajian lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem dan Prosedur Penggajian serta dokumen yang digunakan, lalu untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam sistem penggajian, serta untuk mengetahui perhitungan PPh 21 pada Universitas X sudah akurat atau tidak dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku saat ini. Hasil penelitian tinjauan ini menunjukkan bahwa sistem penggajian pada Universitas X sudah menggunakan Mesin *Fingerprint*, Aplikasi GPP, dan Sistem Payroll. Sistem ini pun sudah dapat membantu pekerjaan dari beberapa fungsi bagian/divisi tertentu agar tidak kesulitan untuk pembuatan daftar gaji, perhitungan gaji, pelaporan gaji dan penyiapan bukti potong pajak. Sistem yang digunakan pun sudah sangat akurat, dan baik. Prosedur penggajian pada Universitas X pun sudah dijalankan oleh bagian divisinya masing-masing sehingga terhindar dari manipulasi dan kecurangan. Adapun dokumen yang membentuk penggajian pun sudah lengkap dan terperinci. Lalu prosedur penggajian pada Universitas X pun telah dilaksanakan sesuai dengan fungsinya, fungsi tersebut terdiri dari fungsi kepegawaian, fungsi pembuat daftar gaji, fungsi akuntansi dan keuangan. Dan terdapat kendala yang

Submitted
OCTOBER 2024

Accepted
MARCH 2025

JABKES

Jurnal Aplikasi Bisnis
Kesatuan

Vol. 5 No. 1, 2025

page. 61 - 70

IBI Kesatuan

ISSN 2807 - 6036

DOI: 10.37641/jabkes.v5i1.1942

dialami oleh Universitas X namun, hal tersebut dapat dikendalikan. Serta perhitungan PPh 21, hasil dari perhitungannya dinyatakan NIHIL dikarenakan Penghasilan Neto Setahun dibawah dari hasil PTKP. Hasil evaluasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem fingerprint ada saja yang tidak melakukan absensi akan tetapi karyawan tersebut tetap menginginkan gajinya tetap full. Namun, bagian SDM ataupun Keuangan pada Universitas X pasti mengetahui hal tersebut. Tetap saja, karyawan tersebut tidak akan mendapatkan haknya karena kesalahan yang diperbuat sendirinya. Universitas X harus memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi. Dengan demikian, hal tersebut tidak akan terulang kembali dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: sistem penggajian, ASN, dokumen penggajian, PPh 21

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan, program kinerja mencakup berbagai kegiatan, seperti menyediakan layanan keuangan dan pembangunan bagi masyarakat luas dan Negara, serta menyediakan layanan lain berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan Negara. Pertanggungjawaban kegiatan diperlukan untuk berbagai kegiatan pemerintahan. Ini dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban atas berhasil atau tidaknya organisasi dalam menjalankan misi dan visinya sehingga tujuan yang dimaksud tercapai dengan baik. Pertanggungjawaban secara berkala, terutama laporan keuangan.

Sangat penting untuk memahami kinerja agar lembaga pemerintah dapat membuat kebijakan dan rencana berdasarkan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Di sini, indikator kinerja utama memiliki peran sangat penting. Instansi pemerintah dapat melihat bagaimana mereka telah bekerja sebelumnya. Pengukuran kinerja bertujuan untuk mendapatkan data yang dianalisis dengan benar sehingga bisa memberikan informasi akurat bagi manajemen untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik tentang bagaimana meningkatkan sistem kinerja bisnis perusahaan.

Untuk merencanakan berbagai kegiatan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini terkait erat dengan sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia adalah bagian dari sistem akuntansi penggajian yang berkontribusi pada kinerja. Selain itu, Lembaga pemerintah harus dapat memberikan balas jasa kepada pegawai dalam bentuk gaji. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pokok-pokok kepegawaian, permasalahan gaji dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus ditangani dengan serius karena berkaitan dengan kehidupan seseorang.

Menurut Mulyadi (2016) Sistem merupakan suatu jaringan prosedural yang dibentuk berdasarkan rumusan yang terintegrasi untuk memenuhi fungsi pokok perusahaan. Fungsi penting yang dimiliki oleh sistem, antara lain:

- **Memproses Informasi :** Sistem memiliki sebuah kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, juga menampilkan informasi yang diperlukan untuk proses tindakan dan pengambilan keputusan.
- **Menghasilkan Output :** Sistem dapat menghasilkan output berupa jasa, produk atau hasil yang diinginkan untuk mencapai tujuan.
- **Mengoptimalkan Sumber Daya :** penggunaan sumber daya yang ada baik secara efektif serta efisien, seperti manusia, mesin, dan bahan, sistem dapat mencapai tujuan dengan biaya yang minimal.

Penggajian sangat penting bagi pegawai yang memberikan kinerjanya untuk sebuah perusahaan atau instansi. Hal ini dikarenakan, gaji yang diterima dapat memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Selain itu, gaji memiliki peranan dalam meningkatkan kinerja serta produktivitas karyawan, yang membantu perusahaan atau instansi untuk mencapai tujuannya. Mengembangkan kinerja pegawai dalam jangka panjang merupakan salah satu dari fungsi gaji.

Sistem penggajian adalah proses tata kelola segala sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran karyawan dan pelaporan pajak gaji. Sistem penggajian terus berubah sesuai dengan perubahan ekonomi, peraturan pemerintah dan kebutuhan tenaga kerja yang terus meningkat. Agar sistem penggajian tidak terus berubah, Lembaga negara perlu menggunakan sistem penggajian yang memungkinkan untuk menghilangkan penyimpangan dan kesalahan dalam perhitungan layanan yang dilakukan pekerja yang dibayar bulanan. Penggunaan sistem penggajian itu sangat penting karena bagi instansi gaji adalah sebuah alat untuk mendorong karyawan agar tetap bekerja.

Sistem penggajian harus disusun secara profesional agar memastikan pembayaran gaji yang tepat waktu juga akurat serta dalam pengambilan keputusan manajemen dapat menyediakan data yang berguna. Ini dapat memastikan bahwa tidak ada dan untuk menghindari beberapa orang melakukan manipulasi terhadap gaji atau penghasilan yang tidak sesuai dengan manajemen penggajian, yang dapat mengurangi produktivitas tenaga kerja.

Prosedur penggajian pegawai di instansi lebih berfokus pada sektor pemenuhan jasa dan layanan. Akan terjadi kecurangan dan penyalahgunaan dalam menjalankan tugas, apabila setiap instansi atau perusahaan tidak memiliki sistem penggajian yang baik, maka harus dicegah dengan memisahkan tugas untuk melakukan pencatatan.

Dalam rangka mengantisipasi kecurangan terhadap absensi dan memudahkan perusahaan dalam mendapatkan data kehadiran karyawan yang akurat dan otomatis perusahaan menggunakan mesin absensi kehadiran atau sering disebut juga dengan *fingerprint*. *Fingerprint* ini memudahkan tugas dari HRD atau SDM dalam mengelola kehadiran karyawannya. Dengan *fingerprint*, karyawan tidak dapat lagi untuk melakukan kecurangan pada absensi serta instansi atau perusahaan akan mudah dalam melakukan perhitungan gaji karyawan. Hal ini dikarenakan *fingerprint* dapat mendeteksi data karyawan dan jam kehadiran mereka melalui sidik jari dari para karyawan. Walaupun, ada saja karyawan yang ingin memanipulasi atau melakukan kecurangan terhadap absensi, akan tetapi pihak SDM pada Universitas X pastinya sudah memiliki data akurat berkaitan dengan absensi. Kembali lagi ke diri masing-masing jika hal ini terjadi lagi. Karena seorang karyawan tidak bisa untuk mendapatkan gaji full padahal jarang melakukan absensi dengan *fingerprint*.

Sistem penggajian pada Universitas X menggunakan aplikasi yang dinamakan dengan Gaji PNS Pusat (GPP) yang dimana dari adanya aplikasi tersebut akan menghindari terjadinya manipulasi. Aplikasi GPP dibuat langsung oleh Kementerian Keuangan. Aplikasi ini berisikan data diri dan dokumen para karyawan yang membentuk sebuah penggajian.

Selain itu, bagian keuangan memiliki sistem terkait dengan perhitungan, pelaporan, dan bukti potong pajak. Sistem tersebut dinamakan sistem payroll, sistem payroll merupakan sebuah sistem pembayaran, penggajian serta pembuatan bukti potong yang dilakukan oleh sebuah instansi atau perusahaan pada karyawan yang dimilikinya secara rutin dalam jangka waktu tertentu. Setiap instansi pasti sudah menggunakan sistem tersebut untuk membantu proses tersebut lebih baik, modern, dan akurat. Jika tidak menggunakan sistem payroll sebuah instansi khususnya pada Universitas X pasti akan kesulitan untuk membuat daftar pembayaran penggajian atau penyiapan bukti potong untuk akhir tahun terlebih lagi Universitas X memiliki banyak pegawai serta mengingat seorang ASN itu memiliki 2 jenis sumber dana yaitu APBN dan Universitas X.

Semua unit fungsional suatu instansi terutama dalam sistem akuntansi pada penggajian memerlukan sistem pengendalian internal yang baik yang mampu mengawasi, mengontrol, dan mengevaluasi. Sistem pengendalian internal merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan oleh manajemen serta seluruh pegawai secara konsisten agar dapat memberikan jaminan yang sesuai mengenai tujuan sebuah lembaga melalui proses yang efektif dan efisien. Sistem pengendalian internal memiliki tujuan untuk memotivasi dan menuntun usaha untuk mencapai tujuan dengan memperbaiki pelaksanaan kegiatan yang tidak efisien dan efektif. Pengujian dilakukan untuk mengetahui seberapa baik sistem pengendalian internal perusahaan berfungsi.

Pada Penggajian pasti akan mengacu pada PPh 21, yang berdasarkan Peraturan Direktur Pajak No. PER-32/PJ/2015, PPh Pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, bonus, tunjangan dan pembayaran lain yang berkaitan dengan perpajakan. Pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan wajib pajak dalam negeri. Subjek pajak penghasilan menurut Pasal 21 adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang diberikan atau diperoleh oleh orang yang dikenai pajak penghasilan. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dikurangi penghasilan neto yang menjadi dasar penghitungan penghasilan kena pajak (PKP).

Universitas X merupakan suatu Lembaga yang menaungi beberapa unit kerja berbeda dengan peran juga dan tanggung jawab yang berbeda. Meskipun demikian, mereka tetap terhubung satu sama lain sehingga menjadi satu Lembaga Kerja. Terkait dengan kepankangan yang mewakili pangkat Aparatur Sipil Negara menurut jabatan dalam rangkaian penyesuaian penggajian dan sebagai dasar perhitungan penggajian. Untuk memudahkan pengelolaan penggajian yang cepat dan akurat, diperlukan suatu sistem penggajian, serta bagaimana contoh perhitungan PPh Pasal 21.

Berdasarkan permasalahan diatas dari penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui Sistem dan Prosedur Penggajian pada Universitas X.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam Sistem Penggajian pada Universitas X.
3. Untuk mengetahui fungsi yang terkait dalam penggajian pada Universitas X.
4. Untuk mengetahui Perhitungan PPh 21 pada Universitas X.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Jl. Raya Dramaga, Babakan, Kec. Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16680. Kegiatan penelitian ini dilakukan tiga bulan yang berlangsung sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023. Penelitian dilakukan selama lima hari dimulai hari senin sampai dengan hari jum'at. Hari senin-kamis dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB, dan hari jum'at dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui cara observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait serta melalui studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Penggajian Pada Universitas X

Sistem Penggajian adalah proses pengelolaan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran karyawan dan pelaporan pajak gaji. Suatu Lembaga Negara sangat memerlukan sebuah sistem penggajian untuk menghindari terjadinya kesalahan atau manipulasi.

Sistem Penggajian dalam sistem aplikasi yang telah ditentukan oleh pemerintah pada bagian keuangan dan sumber daya manusia Universitas X telah berkembang. Sehingga informasi data gaji untuk Pegawai ASN, Pegawai Tetap, Kontrak, dan THL sudah sesuai dengan jabatan dan golongan serta tunjangan-tunjangan yang diterima dan telah terdaftar pada aplikasi. Terkait dengan ASN, pada umumnya ASN memiliki 2 sumber dana yaitu sumber dana yang berasal dari APBN serta dari pihak instansi. Dari kedua sumber dana tersebut terdapat perbedaan mengenai tarif pajak yang diberlakukan.

Untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan terhadap absensi dan memudahkan sebuah Instansi untuk mendapatkan data kehadiran karyawan, maka digunakanlah sebuah sistem yang dinamakan *fingerprint*. Sistem *fingerprint* merupakan sebuah sistem pengecekan absensi menggunakan sidik jari setiap pegawai. Sidik jari setiap manusia memiliki karakteristik yang khas, sehingga dapat dijadikan salah satu alat pengenalan diri. Begitu juga dengan Universitas X yang menerapkan sistem absensi dengan menggunakan sistem *fingerprint*. Mesin *fingerprint* ini sangat memudahkan Universitas X untuk proses pendataan karyawan dan dapat menghindari terjadinya kecurangan. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri pasti ada saja satu atau dua karyawan yang melakukan manipulasi secara tidak langsung. Seperti, mereka menginginkan gaji tetap full yang padahal mereka jarang

melakukan absensi pada *fingerprint* yang padahal pihak SDM atau Keuangan pasti mengetahui tindakan curang pegawai tersebut karena sistem nya langsung terlihat. Mengenai *fingerprint* itu terdapat 2 pencatatan waktu hadir, yaitu Absensi uang makan serta Absensi ketepatan waktu dimana karyawan bekerja dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Absensi dengan *fingerprint* tersebut sudah otomatis terdeteksi untuk uang makan dan ketepatan waktu saja. Maka dari itu, Universitas X tidak memiliki fungsi bidang pencatat waktu untuk penggajian.

Dalam pengelolaan administrasi sistem penggajian, perhitungan serta pembayaran gaji pada Universitas X menggunakan aplikasi yang dinamakan Gaji PNS Pusat (GPP). Gaji PNS Pusat (GPP) adalah suatu aplikasi berupa sistem yang berkaitan dengan pembuatan langkah awal Gaji Pegawai, Uang Makan Pegawai, Kekurangan Gaji Pegawai dan lainnya menyangkut keuangan pegawai yang di input melalui Aplikasi GPP, yang menjadikan aplikasi ini begitu penting, aplikasi ini pun berisi-dokumen serta data penting dari karyawan. Yang mengeluarkan aplikasi tersebut, yaitu Kementerian Keuangan langsung diturunkan ke Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang disebut sebagai KPPN. Berikut penjelasan siklus sistem penggajian pada Universitas X yang menggunakan aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP):

Sebelum di proses ke pusat, Universitas X menggunakan aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP), yang berhubungan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). KPPN, bertanggung jawab untuk melakukan fungsi perbendaharaan dan bendahara umum negara, mengatur pembiayaan untuk beban anggaran, serta memantau penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Jika ada perubahan terkait dengan perubahan-perubahan dokumen atau hal lain dapat langsung di input di aplikasi GPP, setelah selesai dan tidak ada permasalahan, SDM akan mengusulkan gaji pegawai untuk diproses ke KPPN dan pihak SDM akan merekon-kan setelah selesai barulah di usulkan kembali ke KPPN melalui SPP & SPM.

Bagian keuangan pada Universitas X menghitung pembayaran pelaporan pajak lalu membuat bukti potong, yang dimana untuk menyiapkan bukti potong tersebut Universitas X dibantu oleh sistem yang terkait dengan sistem payroll. Sistem payroll ini sudah mulai dikembangkan oleh Universitas X sejak akhir 2018 mengingat bahwa ada 2 jenis sumber dana yakni berasal dari APBN dan Universitas X. Selain karena perbedaan perhitungan, sistem ini pun sangat memudahkan bagian keuangan agar tidak kesulitan untuk menyiapkan bukti potong dengan 145 unit kerja serta ribuan pegawai pada Universitas X.

Efektifitas sistem penggajian pada Universitas X ini sudah baik, mengingat Universitas X memiliki beberapa sistem yang dapat membantu meringankan pekerjaan dari setiap divisi. Seperti halnya mesin *fingerprint*, untuk saat ini sudah efektif dilakukan dan membantu proses pencatatan kehadiran lebih baik untuk proses pembagian uang makan dan ketepatan waktu dari tiap pegawai. Aplikasi GPP pun sudah dapat membantu jalannya proses penggajian, walaupun GPP ini hanya digunakan oleh pegawai ASN saja. Lalu hadirnya sistem payroll terkait perhitungan gaji pun sudah dapat membantu bahkan lebih efektif digunakan bagi bagian keuangan untuk merekap, menghitung, dan pembuatan bukti potong, karena banyak nya para pegawai di Universitas X. maka dari itu, menurut pemaparan, sejauh ini sistem yang digunakan pada Universitas X sudah efektif dan bisa membantu meringankan pekerjaan per divisi nya.

Prosedur Penggajian Pada Universitas X

Pada Prosedur Penggajian Pada Universitas X, pastinya terlebih dahulu kita mengumpulkan dan menginput dokumen-dokumen terkait dengan penggajian karyawan yang ada pada Universitas X. Berikut ini dokumen-dokumen nya adalah:

1. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji

Dokumen ini digunakan sebagai acuan pembuatan gaji, yang akan diberikan ke Penanggung Jawab pembuat gaji di Rektorat Universitas X. Dokumen ini hamper sama dengan usulan gaji secara keseluruhan. Dokumen yang digunakan diantaranya:

- a. Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala (SK KGB)
- b. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat
- c. Surat Keputusan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SK UMPTK)

Yang dibutuhkan dalam surat ini adalah: Surat usulan Universitas X, Surat usulan pimpinan, Perubahan SK UMPTK, Photocopy KK, Photocopy Akta Kelahiran dan Photocopy buku nikah

2. Daftar Gaji

Dokumen ini berisi jumlah gaji bruto yang ditambah dengan tunjangan yang didapat diantaranya:

- a. Tunjangan Suami/Istri
- b. Tunjangan Anak
- c. Tunjangan Beras
- d. Tunjangan Fungsional/Struktural
- e. Tunjangan PPh (biasanya Gol. IV saja yang dikenakan Tunjangan PPh)

Setelah mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan penggajian barulah dokumen itu akan diproses dan membentuk sebuah penggajian. Berikut ini merupakan prosedur pembentukan penggajian, yaitu:

1. Prosedur Penerimaan Pegawai

Penerimaan calon pegawai negeri pada Universitas X ketika sudah diterima langsung dilihat jenjang pendidikannya untuk menentukan jenis golongannya serta menentukan jabatan atau pangkat pekerjaannya, misalkan calon pegawai tersebut jenjang Pendidikan terakhirnya adalah S1, maka secara aturan S1 itu masuk ke dalam golongan III/A. setelah itu SDM akan menginput berdasarkan SK yang diterima yaitu SK CPNS barulah di input ke aplikasi GPP.

2. Prosedur Perhitungan Gaji

SDM akan mengusulkan perubahan data terkait keterangan-keterangan misal sudah menikah dan mempunyai anak, terkait dengan pangkat atau golongan kerja. Karena, perhitungan gaji pokok yang akan dilakukan oleh bagian keuangan ini didapatkan sesuai dengan jabatan dan golongan pada setiap pegawai di Universitas X yang ditambahkan tunjangan serta potongan. Data tersebut akan diusulkan ke GPP lalu diusulkan ke KPPN.

3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM)

Sesudah data pada aplikasi GPP tidak ada permasalahan, baru akan diusulkan kepada KPPN, lalu KPPN akan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang sudah mengakomodir nama pegawai yang bersangkutan dengan NPWP di dalamnya termasuk rekening penerima dan bank yang menerima gaji tersebut.

4. Prosedur Distribusi Biaya Gaji dan Upah

Bagian SDM membuat usulan gaji dari tiap unit kerja, perhitungan penggajian dibuat pada bagian Keuangan begitupun pada penyiapan bukti potong pajak dengan sistem payroll yang dibuat dan disiapkan oleh bagian Pajak, lalu kembali ke SDM untuk pengajuan penggajian ke pusat.

5. Prosedur Pembayaran Gaji dan Pelaporan

Untuk melakukan pencairan dana ke masing-masing rekening pegawai setiap bulannya, bagian keuangan di Universitas X akan membuat laporan gaji.

Berikut rincian Prosedur Penggajian lengkap dari Universitas X:

1. Anggaran gaji diusulkan ke negara melalui direktorat perencanaan dan monitoring Universitas X melalui aplikasi RKA-K/Lm dilengkapi dengan data rincian dan detail gaji pegawai.
2. Kementerian Keuangan memproses usulan anggaran gaji dari Universitas X dan menerbitkan dasar penggunaan anggaran belanja pegawai yang disebut DIPA.
3. DIPA memuat semua anggaran yang diusulkan oleh Universitas X untuk digunakan sebagai pembayaran gaji pegawai Universitas X.

4. Usulan pembayaran gaji diusulkan oleh Bagian SDM ke KPPN sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Keuangan.
5. Usulan gaji pegawai dari tiap unit kerja ke Bagian SDM dilengkapi dengan berkas-berkas perubahan (SK KGB, SK KNP, SKUMPTK dan lainnya).
6. Pembuat daftar gaji (PDG) di Bagian SDM menginput perubahan yang diusulkan oleh unit kerja ke aplikasi GPP sesuai dengan berkas yang diusulkan.
7. Setelah semua perubahan data pegawai diinput oleh pembuat daftar gaji, PDG membuat usulan gaji melalui GPP, output berkas usulan gaji di tandatangi oleh PPABP dan diusulkan ke Bagian Keuangan untuk pengesahan oleh Bendahara dan PPK.
8. Berkas usulan gaji hasil output dari aplikasi GPP memuat nomor GPP yang berurutan dan tidak akan ada penomoran ganda, pengesahan oleh Bendahara Pengeluaran, PPK dan PPABP.
9. Setelah berkas ditandatangani oleh para pejabat pengelola, PPK memerintahkan operator PPK untuk membuat dan menerbitkan SPP melalui aplikasi SAKTI.
10. Setelah dibuat SPP dan ditandatangani oleh PPK, SPP diusulkan kepada PPSM untuk dibuatkan SPM.
11. PPSM menerima SPP beserta kelengkapan berkas usulan gaji.
12. PPSM memerintahkan operator SPM untuk membuat dan menerbitkan SPM melalui aplikasi SAKTI.
13. SPM ditandatangani dan disahkan oleh PPSM.
14. PPSM mengusulkan SPM ke KPPN melalui aplikasi SAKTI.
15. KPPN memproses usulan usulan PPSM dari satker.
16. Apabila SPM tersebut ditolak oleh KPPN, selanjutnya KPPN meminta satker untuk memperbaiki SPM tersebut.
17. Apabila SPM tersebut disetujui oleh KPPN, selanjutnya KPPN memproses usulan SPM gaji tersebut ke pihak Bank Payroll yang tertera di SPM.
18. Pihak Bank Payroll memproses usulan SPM dari KPPN, dan mentransfer dana yang diusulkan langsung ke nomor rekening masing-masing karyawan.
19. Untuk honor masuk ke SPT non-final, ada form tersendiri.

Fungsi Yang Terkait Dalam Penggajian Universitas X

Ini beberapa fungsi bidang kerja yang terkait dengan sistem penggajian pada Universitas X:

- a. Fungsi Kepegawaian
Fungsi bidang kepegawaian dalam penggajian ini bertanggung jawab untuk mencari dan menerima karyawan baru, serta dalam penggajian fungsi bidang ini akan menyiapkan dokumen pendukung perubahan gaji yang akan diajukan pada PDG. Dokumen ini terdiri dari SK KGB, SK KNP, SK UMPTK. Menyiapkan dokumen perubahan gaji pun dilakukan jika ada perubahan dari setiap pegawai, karena adanya pendataan kembali.
- b. Fungsi Pembuat Daftar Gaji dan Upah
Fungsi Bidang PDG ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji setiap karyawan yang berisi penghasilan bruto serta berbagai potongan yang menjadi beban seorang karyawan yang akan diserahkan kepada bidang akuntansi dan keuangan untuk pembayaran gaji dan upah serta pembuatan bukti kas keluar.
- c. Fungsi Akuntansi dan Keuangan
Fungsi bidang akuntansi dan keuangan ini bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban terkait pembayaran gaji, serta mengisi dan mencairkan cek untuk gaji karyawan yang nantinya akan dibagikan melalui rekening masing-masing setiap karyawannya.

Kendala yang Terjadi dalam Sistem Pada Universitas X

Setiap Perusahaan atau Instansi pasti akan mengalami kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi pun berbeda-beda bisa terkait dengan keuangan, sikap dan sifat setiap karyawan, aktivitas yang dijalankan, dan lain sebagainya. Sistem Penggajian

menjadi kendala yang dihadapi oleh Universitas X beberapa waktu yang lalu, diantaranya yaitu absensi dengan *fingerprint* dan perhitungan serta penyiapan bukti potong sebelum menggunakan sistem payroll.

Pertama yang akan dibahas disini terkait dengan sistem absensi karyawan pada Universitas X, kendala yang terjadi disini adalah mengenai kasus karyawan yang tidak melakukan absensi untuk bekerja. *Fingerprint* itu sangat mudah digunakan bagi karyawan, tetapi mengapa masih ada saja karyawan yang tidak melakukan absensi kehadiran. Kendala yang dihadapi pihak Universitas X disini adalah menghadapi para karyawan yang melakukan protes karena menginginkan gajinya tetap full, sebagian karyawan mungkin saja tidak menerima hasil dari gaji yang mereka dapatkan karena tidak sesuai dengan yang seharusnya mereka dapatkan. Ini bisa saja menjadi kasus menipu dengan membohongi pihak SDM atau Keuangan yang padahal sistem *fingerprint* tersebut sudah otomatis terdata untuk uang makan dan ketepatan waktu karyawannya. Maka dari itu, karyawan tidak bisa protes dengan hasil yang didapat karena tidak melakukan absen. Perlu kesadaran diri untuk menghindari kasus seperti ini, dan agar Universitas X bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi.

Selanjutnya sistem payroll yang digunakan untuk perhitungan dan penyiapan bukti potong gaji karyawan. Sebelum tahun 2018, Universitas X memiliki kesulitan untuk melakukan hal tersebut, dikarenakan Universitas X mempunyai 145 Unit Kerja dan ribuan karyawan yang bekerja disana serta adanya 2 jenis sumber dana pada karyawan. Mungkin perhitungan yang dilakukan masih manual dan belum menggunakan sistem, itu menjadi kendala bagi pihak Keuangan. Oleh karena itu, pada 2018 Universitas X mengembangkan fungsi terkait dengan perhitungan serta penyiapan bukti potong pajak bagi karyawan yang disebut dengan sistem payroll. Sistem ini sudah sangat membantu dan meringankan pekerjaan bagi Keuangan.

Perhitungan PPh Pasal 21 ASN Pada Universitas X

Universitas X sebagai pemotong pajak memiliki kewajiban dalam perhitungan PPh Pasal 21 baik itu secara bulanan maupun tahunan. Dalam melakukan perhitungan ini penulis sudah mengambil dan memperoleh data perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap (ASN) pada Universitas X. Berdasarkan data yang diperoleh penulis mendapatkan perhitungan PPh Pasal 21 dari satu orang pegawai Universitas X untuk masa Desember dari SPT Tahunan tahun 2022. Berikut ini informasi data pegawai yang saya dapatkan:

1. Data Pegawai

Tabel 3.2 Data Pegawai

Item	Keterangan
Nama	XXXX XXXX
Jabatan	Pengatur Tingkat 1 / Gol. II/D
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Status	K/2
NPWP	XX.XXX.XXX.X-XXX-XXX
Alamat	Jl. Raya Ciapus RT.04/RW.02 Kec. Tamansari

2. Jenis Penghasilan:
 - a. Gaji Pokok
 - b. Tunjangan berupa tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan fungsional, tunjangan beras, dan
 - c. Tunjangan lain-lain
3. Jenis Pengurangan:

Jenis pengurangan pada Universitas X dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Jenis pengurangannya diantaranya:

 - a. Biaya jabatan 5% dari penghasilan gaji bruto yang diterima oleh pegawai dengan nilai maksimal Rp500.000 untuk sebulan dan Rp6.000.000 untuk setahun.
 - b. Iuran pensiun atau iuran THT/JHT.

- c. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang biasanya berdasarkan status pegawai.

Berikut ini perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai ASN :

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	Rp 45.637.000
Tunjangan Isteri	4.563.000
Tunjangan Anak	1.825.480
Tunjangan Fungsional	4.900.000
Tunjangan Beras	4.055.520
Tunjangan Lain-Lain	581
Total Penghasilan Bruto	Rp 60.982.281

Pengurangan:

Biaya Jabatan	Rp 3.049.114	
Iuran Pensiun	<u>2.471.244</u>	
Jumlah Pengurangan	Rp 5.520.358	
Penghasilan Neto Setahun		Rp 55.461.923

PTKP (K/2)

WP	Rp 67.500.000
PKP	-
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	NIHIL

Nilai PPh Pasal 21 Terutang "NIHIL" dikarenakan Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh Pasal 21 (setahun/disetahunkan) nilainya lebih kecil dibandingkan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Tunjangan Hari Raya, pendapatan Gaji ke 13 tidak masuk ke dalam perhitungan tersebut karena sudah ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan Dasar rujukan pengenaan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima ASN tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkeu 262/2010.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun tentang Tinjauan Sistem dan Prosedur Penggajian dan Perhitungan PPh Pasal 21 pada Universitas X dapat disimpulkan bahwa: Universitas X menggunakan sistem untuk kehadiran yang disebut dengan mesin *fingerprnt*, mesin ini sudah sangat akurat untukk mencegah terjadinya kecurangan dan manipulatif terhadap kehadiran walau satu atau dua orang yang ingin memanipulasi. Mesin *fingerprnt* ini digunakan untuk 2 jenis absensi yaitu absen makan dan absen tepat waktu. Universitas X pun menggunakan aplikasi yang disebut Gaji PNS Pusat (GPP) yang dibuat langsung oleh Kementerian Keuangan, yang menyediakan informasi mengenai data-data pegawai. Serta sistem payroll yang membantu bagian keuangan untuk perhitungan, pelaporan dan penyiapan bukti potong. Ketiga sistem tersebut sejauh ini sudah sangat efektif dan akurat untuk digunakan serta sudah memudahkan pekerjaan para bagian terkait pada penggajian. Prosedur penggajian pada Universitas X sudah memiliki bagiannya masing-masing seperti Bagian SDM, Bagian Pembuat Daftar Gaji, serta Bagian Akuntansi dan Keuangan terkait dengan pembuatan daftar gaji, perhitungan, penyiapan bukti potong, pengajuan penggajian. Prosedur yang dilakukan ada prosedur penerimaan pegawai, prosedur perhitungan gaji, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), Prosedur Distribusi Biaya Gaji dan Upah serta Prosedur Pembayaran Gaji dan Upah. Hal ini diterapkan untuk menghindari terjadinya kecurangan dan manipulasi terhadap data keuangan. Adapun dokumen terkait dengan penggajiian sudah cukup lengkap dan sesuai dengan prosedur yang ada untuk dapat membentuk sebuah penggajian. Dokumen tersebut terdiri dari SK KGB, SK KNP, SK UMPTK, lalu dokumen daftar gaji yang berisi gaji bruto dengan tunjangan-tunjangan yang didapat.

Fungsi yang terdapat pada Universitas X terdiri dari fungsi kepegawaian, fungsi pembuat daftar gaji, serta fungsi keuangan dan akuntansi. Ketiga fungsi tersebut memiliki tugasnya masing-masing. Seperti fungsi kepegawaian menyiapkan dokumen-dokumen untuk penggajian yang nantinya akan diserahkan kepada fungsi pembuat daftar gaji untuk diproses, serta fungsi keuangan dan akuntansi yang akan memproses pembayaran gaji karyawan, mengisi cek dan mencairkan cek yang selanjutnya akan di transfer ke rekening masing-masing karyawan. Hal tersebut sangat efektif dan memudahkan untuk proses penggajian karyawan karena memang seharusnya untuk penggajian karyawan membutuhkan beberapa fungsi untuk menghindari terjadinya manipulasi. Kendala yang dialami oleh Universitas X yaitu mengenai sistem *fingerprnt* dan sistem payroll. Masalah terkait *fingerprnt* yaitu karyawan yang tidak melakukan absensi tetapi menginginkan gaji tetap full. Namun, pihak SDM dan Keuangan pasti mengetahui hal tersebut dan absensi akan otomatis terdata. Lalu sebelum adanya sistem payroll, Universitas X sangat kesulitan untuk melakukan perhitungan dan penyiapan bukti potong penggajian karyawan dikarenakan banyaknya karyawan dan unit kerja pada Universitas X. Oleh karena itu, Universitas X mengembangkan sistem yang dinamakan sistem payroll. Perhitungan PPh Pasal 21 pada Universitas X sudah sesuai dengan aturan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdiri dari gaji pokok, tunjang-tunjangan, biaya jabatan, iuran pensiun, PTKP. Penulis menggunakan perhitungan dari salah satu pegawai ASN dari Universitas X, Nilai PPh Pasal 21 Terutang “NIHIL” dikarenakan Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh Pasal 21 (setahun/disetahunkan) nilainya lebih kecil dibandingkan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ardiyose. 2013. *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta : Citra Harta Prima.
- [2] Dimas. 2010. *Klasifikasi Sistem*. 09 Desember 2010. Website : <https://dimas347.wordpress.com/2010/12/09/klasifikasi-sistem/>
- [3] Hidayat, N dan Es Purwana, D. 2018. *Perpajakan : teori & praktek*. Depok : Rajawali Pers.
- [4] Hamid, A dan Widyaiswara. 2020. *Pengembangan Sumber Daya manusia (SDM)*. 09 oktober 2020. Website : <https://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/berita/pengembangan-sumber-daya-manusia-sdm>
- [5] Hasibuan. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara.
- [6] IKHAPI. 2020. *Apakah Gaji PNS Dibebeani Pajak Penghasilan*. 21 Desember 2020. Website : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-gaji-pns-dibebeani-pajak-penghasilan-t5fe0280dcdfee/>
- [7] Jayanti, D., & Iriani, S., 2014. Sistem Informasi Penggajian Pada CV. Blumbang Sejati Pacitan. *Speed-Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi*, 6(3).
- [8] Media Komunitas Perpajakn Indonesia. 2015. *Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER – 32/PJ/2015*. 07 Agustus 2015. Website <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/15839>
- [9] Mulyadi, 2016. *Sistem Akuntansi*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- [10] Poerwono. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- [11] Purba, D. H., 2018. Sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan: Studi kasus pada sebuah rumah sakit. *Jurnal manajemen*, 4(1), 15-22.
- [12] Romney, M.B dan Paul, J.S. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 13. Jakarta : Salemba Empat.
- [13] SarjanaEkonomi.Co.Id. 2022. *Pengertian Gaji : Fungsi, Tujuan, Peranan, Bentuk & Metodenya*. 28 Juli 2022. Website: <https://sarjanaekonomi.co.id/gaji-adalah/>
- [14] Sumarsan, T. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 4. Jakarta : Indeks.
- [15] [16] Susanto, A. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung : Lingga Jaya.
- [17] TMBooks. 2018. *Perpajakan Indonesia: Prinsip dan praktik*. Yogyakarta : ANDI.